RENCANA KERJA

Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun 2023



Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

RENCANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl.Kidang Pananjung No. 3 Telp. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 800/Kpts.103/Disparbud/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PANGANDARAN

Menimbang
a. Bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja.
b. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf a perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :

I. Pendahuluan
   1.1. Latar Belakang
   1.2. Landasan Hukum
   1.3. Maksud dan Tujuan
   1.4. Sistematika Penulisan
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
   2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
   2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
   2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
   3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
   3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
   3.3. Program dan Kegiatan
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
V. Penutup

KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran
pada tanggal : 27 Juli 2022

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

TONTON GUNTARI, S.H
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19661206 199203 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pangandaran,
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Pangandaran,
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

K ATA P ENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dapat tersusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Tahun 2023 di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pangandaran, 27 Juli 2022

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

TONTON GUNTARI, S.H
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP. 19661206 199203 1 005

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 14

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022 14

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN 54

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 57

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 59

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 99

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 99

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 102

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 103

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 118

BAB V PENUTUP 120

D A F T A R T A B E L

T-C.29 …… 30

T-C 30 …… 56

T-C 31 …… 60

T-C 32 …… 91

T-C.33 …… 104

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen rancangan awal rencana kerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebelum akhirnya ditetapkan menjadi RENJA SKPD.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan dinas. Renja juga ”menjembatani” sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai langkah awal penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja berfungsi untuk menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2023.

1.2. L A N D A S A N H U K U M

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional

   Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 antara lain:

   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
   2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

1.3. M A K S U D D A N T U J U A N

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.
1.2. LANDASAN HUKUM
Menjelaskan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Menjelaskan tentang maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 serta susunan garis besar dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

B A B II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA T A H U N LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN R E N S T R A TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 Kabupaten Pangandaran dapat dilihat sebagai berikut :

I. URUSAN KEBUDAYAAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Program Perlindungan Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 877.451.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.851.450,00 atau 69,16% dengan indicator program persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan sebesar 20% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

i. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 852.451.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.851.450,00 atau 71,19% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola. Hasil yang dicapai adalah 20%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 802.451.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 606.851.450,00 atau 75,62% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan dan jumlah dokumen database kebudayaan yang termutakhirkan dan dipublikasikan. Hasil yang dicapai adalah 2 objek pemajuan kebudayaan, 2 objek pemajuan kebudayaan dan 1 dokumen.
2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina. Hasil yang dicapai adalah 0 orang.

ii. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang

dilestarikan. Hasil yang dicapai adalah 0%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang mempertahankan pakem dan dilindungi. Hasil yang dicapai adalah 0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya.

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 39.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00 atau 87,88% dengan indikator program persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola sebesar 3% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

   i. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 39.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00 atau 87,88% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase cagar budaya yang ditetapkan. Hasil yang dicapai adalah 3%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

   1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 39.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00 atau 87,88% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen database objek diduga cagar budaya yang termutakhirkan dan dipublikasikan. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.

1. URUSAN PARIWISATA

Dinas Priwisata dan Kebudayaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 6.000.677.566,60 dan terealisasi sebesar Rp. 4.346.485.909,00 atau 72,43% dengan 4 (empat) indikator program yakni: (1) persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi sebesar 90%, (2) persentase laporan keuangan dengan kualitas baik sebesar 90%, (3) persentase peningkatan kompetensi aparatur dan persentase perencanaan sebesar 90% dan (4) evaluasi kinerja yang berkualitas sebesar 90% yang diimplementasikan ke dalam 8 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
   i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 59.525.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.525.000,00 atau 79,84% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90%, persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90% dan persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 90%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 56.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,00 atau 79,84% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun. Hasil yang dicapai adalah 11 dokumen.
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 3.425.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.425.000,00 atau 100% dan

indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan. Hasil yang dicapai adalah 3 laporan.

ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 4.416.512.495,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.406.547.009,00 atau 77,13% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik. Hasil yang dicapai adalah 90%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.316.512.495,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.342.367.009,00 atau 77,43% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan. Hasil yang dicapai adalah 34 orang.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.700.000,00 atau 68,80% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.680.000,00 atau 55,85% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah 1 kegiatan dan 1 laporan.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000,00 atau 100% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun. Hasil yang dicapai adalah 1 laporan.

iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 77,78% dan indikator dari kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik. Hasil yang dicapai adalah 22 jenis dan 1.006 unit/buah. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 77,78% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola. Hasil yang dicapai adalah 23 jenis dan 1.198 unit/buah.

iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 49.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 85,37% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah. Hasil yang dicapai adalah 21,53%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 atau 85,37% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan. Hasil yang dicapai adalah 1 laporan.

v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 39.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 75,76% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik. Hasil yang dicapai adalah 100%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 75,76% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola. Hasil yang dicapai adalah 10 data.
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 75,76% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan. Hasil yang dicapai adalah 1 kegiatan dan 1 laporan.

vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 668.486.650,60 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 326.044.192,00 atau 48,77% dan

indikator dari kegiatan ini adalah persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik. Hasil yang dicapai adalah 100%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.962.576,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.736.000,00 atau 95,43% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 2 jenis dan 34 unit/buah.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 460.769.720,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.399.287,00 atau 53,69% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan. Hasil yang dicapai adalah 54 jenis dan 4.685 unit/buah.
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.068.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.612.150,00 atau 91% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 3 jenis dan 64 unit/buah.
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.708.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.810.000,00 atau 51,85% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 3 jenis dan 15 eksemplar.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 172.977.854,60 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.486.755,00 atau 32,66% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan. Hasil yang dicapai adalah 2 kegiatan dan 24 laporan.

vii. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 551.636.635,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 312.865.692,00 atau 56,72% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 100%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.600.000,00 atau 63,64% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 1.407 buah.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 289.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.298.192,00 atau 45,38% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan. Hasil yang dicapai adalah 3 rekening dan 12 bulan.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 242.536.635,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.967.500,00 atau 69,67% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 12 bulan, 7 orang dan 4 layanan.

viii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 161.716.786,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 139.504.016,00 atau 96,79% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase prasarana yang baik dan layak fungsi. Hasil yang dicapai adalah 86,26%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 95.466.786,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.284.016,00 atau 77,81% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan. Hasil yang dicapai adalah 13 unit.
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.220.000,00 atau 83,52% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola. Hasil yang dicapai adalah 2 unit.
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang direhabilitasi. Hasil yang dicapai adalah 2 unit dan 750 m2.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.725.427.882,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.965.594.599,00 atau 69,57% dengan indikator program persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan. Hasil yang dicapai sebesar 13,68%. Program ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
   i. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 18.485.629.882,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.806.546.599,00 atau 63,87% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase destinasi pariwisata yang dikelola. Hasil yang dicapai adalah 4,21%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
      1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 369.676.287,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 368.356.787,00 atau 99,64% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan. Hasil yang dicapai adalah 36 destinasi pariwisata.
      2) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.799.342.467,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.095.718.000,00 atau 71,06% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang disediakan dan jumlah sarana dan

prasarana destinasi pariwisata yang dipelihara. Hasil yang dicapai adalah 2 jenis dan 1 jenis.

3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.656.915.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.094.988.312,00 atau 44,99% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah destinasi pariwisata yang melibatkan parsitifasi masyarakat dalam pengelolaanya dan jumlah destinasi pariwisata yang memberikan pembinaan kesadaran wisata kepada masyarakat sekitarnya. Hasil yang dicapai adalah 0 destinasi pariwisata dan 5 destinasi pariwisata.
4) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 659.695.678,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 247.483.500,00 atau 37,51% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah indikator destinasi pariwisata berkelanjutan yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi. Hasil yang dicapai adalah 0 Indikator Berkelanjutan.

ii. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 239.798.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.048.000,00 atau 66,33% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan. Hasil yang dicapai adalah 47,33%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

39.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.800.000,00 atau 87,88% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani. Hasil yang dicapai adalah 300 usaha pariwisata.

2) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.198.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 124.248.000,00 atau 62,06% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan. Hasil yang dicapai adalah 2 usaha pariwisata.

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 205.039.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.115.000,00 atau 48,34% dengan indikator program persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan sebesar 10,52% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
   i. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 205.039.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.115.000,00 atau 48,34% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan. Hasil yang dicapai adalah 10,52%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
      1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 83.085.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.680.000,00 atau 62,20% dan

indikator dari sub kegiatan ini adalah jenis media promosi yang dibuat. Hasil yang dicapai adalah 1 jenis.

2) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 116.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.155.000,00 atau 40,51% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah database kepariwisataan yang akurat dan termutakhirkan yang disusun dan disebarkan. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.

3) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.554.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 280.000,00 atau 5,04% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah kerjasama kemitraan dengan industri pariwisata dalam hal promosi pariwisata yang dibuat. Hasil yang dicapai adalah 1 kerjasama.

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.400.000,00 atau 87,88% dengan indikator program persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi sebesar 11,76% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

   i. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.400.000,00 atau 87,88% dan indikator dari kegiatan ini adalah persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan. Hasil yang dicapai

adalah 11,76%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.400.000,00 atau 87,88% dan indikator dari kegiatan ini adalah jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan. Hasil yang dicapai adalah 2 subsektor.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 547.290.713,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 539.603.213,00 atau 98,60% dengan indikator program persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing sebesar 4,27% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
   1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 547.290.713,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 539.603.213,00 atau 98,60%. Indikator kegiatan ini adalah Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar. Hasil yang dicapai sebesar 4,27%. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
      1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 261.561.356,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.753.356,00 atau 98.54% dan indikator sub kegiatan ini adalah jumlah SDM ekonomi kreatif yang

mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar dan Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar. Hasil yang dicapai adalah 15 orang dan 355 orang.

2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 285.729.357,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 281.849.857,00 atau 98,64% dan indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang ikut berperan serta dalam peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata. Hasil yang dicapai adalah 180 orang.

Adapun terkait perkiraan capaian RENSTRA sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C. 29 di halaman berikutnya:

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah **: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN BIDANG PARIWISATA									
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**12%**	**0%**	**5%**	**14%**	**274%**	**10%**	**24%**	**197%**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase daya tarik wisata yang dikelola**	**12%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**10%**	**10%**	**83%**
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan	2 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0%	2 Daya Tarik Wisata	2 Daya Tarik Wisata	100%
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembnagan daya tarik wisata yang disusun	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

								Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata bahari dan perairan yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0%	2 Daya Tarik Wisata	2 Daya Tarik Wisata	100%
									Jumlah daya tarik wisata perdesaan dan desa wisata yang dikembangkan	2 Desa Wisata	0 Desa Wisata	0 Desa Wisata	0 Desa Wisata	0%	2 Desa Wisata	2 Desa Wisata	100%
									Jumlah daya tarik wisata alam (non bahari) yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0%	2 Daya Tarik Wisata	2 Daya Tarik Wisata	100%
									Jumlah daya tarik wisata budaya yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0 Daya Tarik Wisata	0%	2 Daya Tarik Wisata	2 Daya Tarik Wisata	100%
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	**12%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**10%**	**10%**	**83%**
								Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen peraturan dan pengendalian pengembangan kawasan strategis pariwisata yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Strategis Pariwisata dipelihara/dikelola/dikembangkan	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	5 Jenis	5 Jenis	100%
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kawasan strategis pariwisata yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan	1 Kawasan Strategis Pariwisata	0 Kawasan Strategis Pariwisata	0 Kawasan Strategis Pariwisata	0 Kawasan Strategis Pariwisata	0%	1 Kawasan Strategis Pariwisata	1 Kawasan Strategis Pariwisata	100%
								Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**12%**	**0%**	**5%**	**4%**	**84%**	**10%**	**14%**	**118%**
								Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan destinasi pariwisata yang disusun	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen peraturan dan pengendalian pengembangan destinasi pariwisata yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisat	36 Destinasi	720%	2 Destinasi Pariwisata	38 Destinasi Pariwisata	1900%

											a	Pariwisata				
									Jumlah destinasi pariwisata yang menyediakan layanan keamanan dan kesehatan dengan baik dan aktif	5 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%	5 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisata	100%
									Jumlah destinasi pariwisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu	5 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%	5 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisata	100%
									Jumlah destinasi pariwisata yang menyediakan atau memiliki petugas pemberi pelayanan informasi	5 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%	5 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisata	100%
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang disediakan	5 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	5 Jenis	7 Jenis	140%
									Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dipelihara	6 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	33%	6 Jenis	7 Jenis	117%
									Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang direhabilitasi	3 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	3 Jenis	3 Jenis	100%
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang melibatkan parsitifasi masyarakat dalam pengelolaanya	2 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	2 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	0%	2 Destinasi Pariwisata	2 Destinasi Pariwisata	100%

									Jumlah destinasi pariwisata yang memberikan pembinaan kesadaran wisata kepada masyarakat sekitarnya	5 Destinasi Pariwisata	0 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisata	5 Destinasi Pariwisata	100%	5 Destinasi Pariwisata	10 Destinasi Pariwisata	200%
								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah indikator destinasi pariwisata berkelanjutan yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi	10 Indikator Berkelanjutan	0 Destinasi Pariwisata	1 Indikator Berkelanjutan	0 Indikator Berkelanjutan	0%	10 Indikator Berkelanjutan	10 Indikator Berkelanjutan	100%
								Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan**	**12%**	**0%**	**5%**	**47%**	**947%**	**10%**	**57%**	**478%**
								Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani	100 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	50 Usaha Pariwisata	300 Usaha Pariwisata	600%	100 Usaha Pariwisata	400 Usaha Pariwisata	400%
								Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan	3 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	100%	3 Usaha Pariwisata	5 Usaha Pariwisata	167%
									Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pengawasan	13 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	13 Usaha Pariwisata	13 Usaha Pariwisata	100%
									Jumlah peraturan dan panduan untuk industri dan usaha pariwisata yang disusun, diterapkan dan ditegakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang distandarisasi	2 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	0%	2 Usaha Pariwisata	2 Usaha Pariwisata	100%
								Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan**	**30%**	**0%**	**20%**	**11%**	**53%**	**25%**	**36%**	**118%**

								Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan**	**30%**	**0%**	**20%**	**11%**	**53%**	**25%**	**36%**	**118%**
								Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jenis media promosi yang dibuat	2 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	2 Jenis	3 Jenis	150%
								Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
									Jumlah event promosi yang diikuti dan diselenggarakan	5 Event	0 Event	0 Event	0 Event	0%	5 Event	5 Event	100%
								Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah database kepariwisataan yang akurat dan termutakhirkan yang disusun dan disebarkan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama segmentasi pasar pariwisata yang dijalin	1 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0 Kerjasama	0%	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%
									Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri pariwisata dalam hal promosi pariwisata yang dibuat	1 Kerjasama	0 Kerjasama	1 Kerjasama	1 Kerjasama	100%	1 Kerjasama	2 Kerjasama	200%

								Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen strategi pemasaran dan pemilihan pasar sasaran dengan memperhatikan pola kunjungan, dampak kunjungan dan kebutuhan destinasi yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang data pengeluaran pengunjung yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang data tingkat hunian hotel yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
									Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang lama tinggal wisatawan yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi**	**12%**	**0%**	**5%**	**12%**	**235%**	**10%**	**22%**	**181%**

								Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase parasana kreatif yang dibangun**	**12%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**10%**	**10%**	**83%**
								Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana zona kreatif yang dibangun	1 Zona Kreatif	0 Zona Kreatif	0 Zona Kreatif	0 Zona Kreatif	0%	1 Zona Kreatif	1 Zona Kreatif	100%
									Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	3 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	3 Jenis	3 Jenis	100%
								Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**12%**	**0%**	**5%**	**12%**	**235%**	**10%**	**22%**	**181%**
								Pengembangan Riset	Jumlah riset ekonomi kreatif yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	2 Subsektor	0 Subsektor	2 Subsektor	2 Subsektor	100%	2 Subsektor	4 Subsektor	200%
								Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang disediakan	2 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0%	2 Jenis	2 Jenis	100%
								Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan untuk mengakses pasar global	2 Subsektor	0 Subsektor	0 Subsektor	0 Subsektor	0%	2 Subsektor	2 Subsektor	100%
									Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan	5 Produk	0 Produk	0 Produk	0 Produk	0%	5 Produk	5 Produk	100%
								Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang terregistrasi HKI	2 Produk	0 Produk	0 Produk	0 Produk	0%	2 Produk	2 Produk	100%

								Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing**	**20%**	**0%**	**5%**	**4%**	**85%**	**15%**	**19%**	**96%**
								Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar**	**20%**	**0%**	**10%**	**4%**	**43%**	**15%**	**19%**	**96%**
								Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar	100 Orang	0 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	100 Orang	115 Orang	115%
									Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar	100 Orang	0 Orang	100 Orang	80 Orang	80%	100 Orang	180 Orang	180%
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang ikut berperan serta dalam peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata	100 Orang	0 Orang	100 Orang	180 Orang	180%	100 Orang	280 Orang	280%
								Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah sumber daya manusia (masyarakat) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100 Orang	100 Orang	100%
									Jumlah sumber daya manusia (guru) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100 Orang	100 Orang	100%

									Jumlah sumber daya manusia (pelajar) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100 Orang	100 Orang	100%
								Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	20 Orang	20 Orang	100%
								Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**20%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**15%**	**15%**	**75%**
								Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kraetif yang mendapatkan pelatihan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
									Jumlah pelaku ekonomi keratif yang mendapatkan bimbingan teknis yang relevan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
									Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
								Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang distandarisasi	5 Usaha	0 Usaha	0 Usaha	0 Usaha	0%	5 Usaha	5 Usaha	100%
									Jumlah profesi di bidang ekonomi kreatif yang disertifikasi	5 Profesi	0 Profesi	0 Profesi	0 Profesi	0%	5 Profesi	5 Profesi	100%
								URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN									

								Program Pengembangan Kebudayaan	**Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan**	**14%**	**0%**	**10%**	**20%**	**200%**	**12%**	**32%**	**229%**
								Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola**	**14%**	**0%**	**10%**	**20%**	**200%**	**12%**	**32%**	**229%**
								Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terregistrasi HKI	1 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0%	1 Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Objek Pemajuan Kebudayaan	100%
									Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	100%	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Objek Pemajuan Kebudayaan	200%
									Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	100%	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Objek Pemajuan Kebudayaan	200%
									Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0 Objek Pemajuan Kebudayaan	0%	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan	100%
									Jumlah dokumen database kebudayaan yang termutakhirkan dan dipublikasikan	1 dokumen	0 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
								Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina	25 Orang	0 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%

									Jumlah Lembaga Kebudayaan yang dibina	2 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0%	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
									Jumlah Pranata Kebudayaan yang dibina	2 Pranata	0 Pranata	0 Pranata	0 Pranata	0%	2 Pranata	2 Pranata	100%
								Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan**	**14%**	**0%**	**10%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**
								Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang mempertahankan pakem dan dilindungi	1 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0%	1 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100%
									Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dikembangkan	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0%	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100%
									Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dimanfaatkan	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0%	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100%
								Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi kepada pemajuan kebudayaan	2 Pihak	0 Pihak	0 Pihak	0 Pihak	0%	2 Pihak	2 Pihak	100%

								Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga adat yang dibina**	**14%**	**0%**	**10%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**
								Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dilindungi	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0%	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	100%
									Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dikembangkan	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0%	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	100%
									Jumlah objek pemajuan kebudayaan lembaga adat yang dimanfaatkan	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0 Objek Pemajuan Lembaga Adat	0%	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	100%
								Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia adat daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
									Jumlah lembaga adat daerah yang mendapatkan pembinaan	2 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0%	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
									Jumlah pranata adat daerah yang mendapatkan pembinaan	1 Pranata	0 Pranata	0 Pranata	0 Pranata	0%	1 Pranata	1 Pranata	100%
								Program Pengembangan Kesenian Tradisional	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**	**14%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**
								Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan**	**14%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**

								Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang dididik	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
									Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pelatihan	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
								Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang distandarisasi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	5 Orang	5 Orang	100%
									Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang disertifikasi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	5 Orang	5 Orang	100%
								Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia pada lembaga kesenian yang mengikuti peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%
								Program Pembinaan Sejarah	**Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan**	**14%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**
								Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan**	**14%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**12%**	**12%**	**86%**
								Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia yang ikut serta dalam pemberdayaan sejarah lokal	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	25 Orang	100%

									Jumlah lembaga sejarah yang ikut serta dalam pemberdayaan sejarah lokal	3 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0%	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
								Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**7%**	**0%**	**3%**	**70%**	**2326%**	**5%**	**75%**	**1068%**
								Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**7%**	**0%**	**3%**	**0%**	**0%**	**5%**	**5%**	**71%**
								Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah dokumen database objek diduga cagar budaya yang termutakhirkan dan dipublikasikan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
									Jumlah objek diduga cagar budaya yang teregistrasi	10 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0%	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	100%
								Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	5 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0%	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	100%
									Jumlah dokumen peraturan tentang penetapan cagar budaya yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**7%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**5%**	**5%**	**71%**
								Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terpelihara dari kerusakan atau kehilangan	1 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0 Cagar Budaya	0%	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	100%
								NON URUSAN									
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**90%**	**0%**	**90%**	**99%**	**110%**	**90%**	**189%**	**210%**
									Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**

									Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
									Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
									Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
									Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	11 Dokumen	220%	5 Dokumen	16 Dokumen	320%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0%	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	100%
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0%	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	100%
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0%	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	100%
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0%	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	100%

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 Kegiatan dan 16 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0 Kegiatan dan 0 Dokumen	0%	4 Kegiatan dan 16 Dokumen	4 Kegiatan dan 16 Dokumen	100%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	3 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0%	3 Laporan	6 Laporan	200%
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**90%**	**0%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**190%**	**211%**
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	42 Orang	0 Orang	35 Orang	34 Orang	97%	42 Orang	76 Orang	181%
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	2 Kegiatan dan 2 Laporan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	100%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	200%
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	300%
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analaisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100%
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	**0 Jenis dan 0 Unit/Buah**	**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	**22 Jenis dan 1006 Unit/Buah**	**111%**	**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	**52 Jenis dan 1906 Unit/Buah**	**211%**
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	1 Jenis dan1 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0%	1 Jenis dan1 Unit/Buah	1 Jenis dan1 Unit/Buah	100%
								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%
								Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%

								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	35 Jenis dan 1200 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	35 Jenis dan 1200 Unit/Buah	23 Jenis dan 1198 Unit/Buah	99%	35 Jenis dan 1200 Unit/Buah	58 Jenis dan 2398 Unit/Buah	199%
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	2 Jenis dan 9 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	2 Jenis dan 9 Unit/Buah	2 Jenis dan 9 Unit/Buah	100%
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**15%**	**15%**	**5%**	**22%**	**431%**	**10%**	**47%**	**310%**
								Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
								Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan yang dianalisa, dikembangkan dan disusun	1 Kebijakan	0 Kebijakan	0 Kebijakan	0 Kebijakan	0%	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%
								Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi daerah yang dikelola	2 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0%	2 Data	2 Data	100%
								Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**280%**	**311%**

								Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Jenis dan 1 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	1 Jenis dan 1 Unit/Buah	1 Jenis dan 1 Unit/Buah	100%
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	42 Set	0 Set	0 Set	0 Set	0%	42 Set	42 Set	100%
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Data	10 Data	200%	5 Data	15 Data	300%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	200%
								Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan dan 1 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	1 Kegiatan dan 1 Laporan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	100%
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	42 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	42 Orang	42 Orang	100%
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	3 Kegiatan dan 3 Laporan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	100%
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	0%	3 Kegiatan dan 3 Laporan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	100%

								Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**280%**	**311%**
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis dan 20 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	5 Jenis dan 20 Unit/Buah	2 Jenis dan 34 Unit/Buah	120%	5 Jenis dan 20 Unit/Buah	7 Jenis dan 54 Unit/Buah	203%
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	60 Jenis dan 4000 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	60 Jenis dan 4000 Unit/Buah	54 Jenis dan 4685 Unit/Buah	117%	60 Jenis dan 4000 Unit/Buah	114 Jenis dan 8685 Unit/Buah	217%
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	100%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis dan 10 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	3 Jenis dan 10 Unit/Buah	3 Jenis dan 10 Unit/Buah	100%
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis dan 30 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	3 Jenis dan 30 Unit/Buah	3 Jenis dan 64 Unit/Buah	203%	3 Jenis dan 30 Unit/Buah	6 Jenis dan 94 Unit/Buah	303%
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis dan 17 Eksemplar	0 Jenis dan 0 Eksemplar	3 Jenis dan 17 Eksemplar	3 Jenis dan 15 Eksemplar	90%	3 Jenis dan 17 Eksemplar	6 Jenis dan 32 Eksemplar	190%
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	2 Jenis dan 6 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	2 Jenis dan 6 Unit/Buah	2 Jenis dan 6 Unit/Buah	100%
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	3000 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	3000 Orang	3000 Orang	100%

								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2 Kegiatan dan 150 Laporan	0 Kegiatan dan 0 Laporan	2 Kegiatan dan 150 Laporan	2 Kegiatan dan 24 Laporan	17%	2 Kegiatan dan 150 Laporan	4 Kegiatan dan 174 Laporan	117%
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	2 Sistem	0 Sistem	0 Sistem	0 Sistem	0%	2 Sistem	2 Sistem	100%
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**90%**	**90%**	**0%**	**0%**	**0%**	**90%**	**180%**	**200%**
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	100%
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	3 Unit	100%
								Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	100%
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 Jenis dan 6 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	4 Jenis dan 6 Unit/Buah	4 Jenis dan 6 Unit/Buah	100%
								Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Jenis dan 2 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0 Jenis dan 0 Unit/Buah	0%	1 Jenis dan 2 Unit/Buah	1 Jenis dan 2 Unit/Buah	100%

								Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	1 Jenis dan2 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0 Jenis dan0 Unit/Buah	0%	1 Jenis dan2 Unit/Buah	1 Jenis dan2 Unit/Buah	100%
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit dan 200 M2	0 Unit dan 0 M2	0 Unit dan 0 M2	0 Unit dan 0 M2	0%	1 Unit dan 200 M2	1 Unit dan 200 M2	100%
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 Jenis dan 15 Unit/Buah atau 50 M2	0 Jenis dan 0 Unit/Buah atau 0 M2	0 Jenis dan 0 Unit/Buah atau 0 M2	0 Jenis dan 0 Unit/Buah atau 0 M2	0%	5 Jenis dan 15 Unit/Buah atau 50 M2	5 Jenis dan 15 Unit/Buah atau 50 M2	100%
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**111%**	**90%**	**280%**	**311%**
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000 Buah	0 Buah	1000 Buah	1407 Buah	141%	1000 Buah	2407 Buah	241%
								Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Rekening dan 12 Bulan	0 Rekening dan 0 Bulan	3 Rekening dan 12 Bulan	3 Rekening dan 12 Bulan	100%	3 Rekening dan 12 Bulan	6 Rekening dan 24 Bulan	200%
								Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 1 Orang atau 10 Unit	0 Bulan dan 0 Orang atau 0 Unit	0 Bulan dan 0 Orang atau 0 Unit	0 Bulan dan 0 Orang atau 0 Unit	0%	12 Bulan dan 1 Orang atau 10 Unit	24 Bulan dan 2 Orang atau 20 Unit	209%
								Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 13 Orang atau 4 Layanan	0 Bulan dan 0 Orang atau 0 Layanan	12 Bulan dan 7 Orang atau 4 Layanan	12 Bulan dan 7 Orang atau 4 Layanan	79%	12 Bulan dan 10 Orang atau 4 Layanan	24 Bulan dan 20 Orang atau 8 Layanan	179%

								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**90%**	**90%**	**90%**	**84%**	**93%**	**90%**	**264%**	**293%**
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	11 Unit	0 Unit	11 Unit	13 Unit	118%	11 Unit	23 Unit	209%
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	100%
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	15 Unit	0 Unit	15 Unit	2 Unit	13%	15 Unit	17 Unit	113%
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	3 Unit	100%
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	1 Jenis atau 1 Unit atau 1 Buah	0 Jenis atau 0 Unit atau 0 Buah	0 Jenis atau 0 Unit atau 0 Buah	0 Jenis atau 0 Unit atau 0 Buah	0%	1 Jenis atau 1 Unit atau 1 Buah	1 Jenis atau 1 Unit atau 1 Buah	100%
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan 80 M2	0 Unit dan 0 M2	1 Unit dan 20 M2	2 Unit dan 750 M2	3581%	2 Unit dan 80 M2	4 Unit dan 830 M2	1017%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis Kinerja Pelayanan merupakan gambaran kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mempunyai tolok ukur dan kinerja yang akan diuji maka tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing disesuaikan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja utama tersebut dapat dilihat pada tabel T-C. 30 berikut.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			BB	-	-	-	A	-	-	-	
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan lokal			70%	-	-	-	60%	-	-	-	
3	Jumlah PAD sektor Pariwisata			27,5 M	-	-	-	13.786.568.250,00	-	-	-	
4	Persentase pengembangan ekonomi kreatif			50%	-	-	-	45,83%	-	-	-	
5	Persentase pemenuhan kriteria GSTC-D sektor pariwisata			80%	-	-	-	63,41%	-	-	-	
6	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			-	2%	4%	6%	-	-	4%	6%	
7	Rata-rata lama tinggal wisatawan			-	1,17 (Hari)	1,29 (Hari)	1,42 (Hari)	-	-	1,29 (Hari)	1,42 (Hari)	

8	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif			-	20%	25%	30%	45,83%	-	25%	30%	
9	Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan			-	10%	15%	20%	-	-	15%	20%	
10	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran			-	66,90-67,15	67,25-69,00	69,25-72,00	85,54	-	67,25-69,00	69,25-72,00	

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, yaitu :

1. Faktor Internal
    a. Belum optimalnya pendayagunaan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas dari SDM aparatur yang tersedia sehingga menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja.
    b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja seperti peralatan dan perlengkapan kantor sehingga kurang maksimalnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
    c. SOP dan sistem kerja yang masih belum lengkap dan terstruktur sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam melaksanakan tugas sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
    d. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga tidak semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana.

2. Faktor Eksternal
    a. Belum tertatanya dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan.
    b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan mendukung Sapta Pesona.
    c. Tidak tersedianya lahan milik pemda terutama pada objek-objek vital pariwisata, sehingga kerap kali terkendala dalam proses pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata serta pelaksanaan event pariwisata pada objek-objek tersebut.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas;
2. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
3. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
4. Daya saing produk wisata yang belum optimal;
5. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal;
6. Kompetisi destinasi pariwisata regional dan pencitraan Pariwisata Indonesia yang belum optimal;
7. Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu;
8. Masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
9. SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas;
10. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektoral masih belum berjalan efektif;
11. Revitalisasi/penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan sapta pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pangandaran;
12. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada di dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat;
13. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan;
14. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat, pelaku pariwisata untuk mendukung kegiatan kepariwisataan;

15. Peningkatan Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta (industri pariwisata) dan pemberdayaan masyarakat;
16. Pembangunan kepariwisataan daerah, dengan prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
17. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
18. Meningkatkan peran Industri dalam mendukung pengembangan pariwisata;
19. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;
20. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
21. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademi;
22. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangandaran.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rancangan awal SKPD adalah proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan temuan-temuan dalam proses tersebut. Adapun detail review dapat dilihat pada tabel T-C. 31.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**40.354.352.904,75**	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**87.539.383.876,10**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**40.354.352.904,75**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**87.539.383.876,10**	
3	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**12%**	**18.580.525.600**	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Pangandaran	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	**14%**	69.318.448.632	
4	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase daya tarik wisata yang dikelola**	**12%**	**2.570.955.000**	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	**14%**	2.065.847.000	
5	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah daya tarik wisata yang ditetapkan	2 Daya Tarik Wisata	50.500.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	2.005.315.460	

6	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan pengembnagan daya tarik wisata yang disusun	3 Dokumen	454.500.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.531.540	
7	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah daya tarik wisata bahari dan perairan yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata	2.005.355.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	**14%**	1.499.999.730	
8			Jumlah daya tarik wisata perdesaan dan desa wisata yang dikembangkan	2 Desa Wisata		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.499.999.730	
9			Jumlah daya tarik wisata alam (non bahari) yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	**14%**	65.298.102.572	
10			Jumlah daya tarik wisata budaya yang dikembangkan	2 Daya Tarik Wisata		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6.096.406.590	
11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen	60.600.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	5 Lokasi	7.781.751.590	

								Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			
12	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	**12%**	**1.940.715.000**	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	50.797.872.260	
13	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata yang disusun	2 Dokumen	808.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	400.399.950	
14			Jumlah dokumen peraturan dan pengendalian pengembangan kawasan strategis pariwisata yang disusun	1 Dokumen		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	221.672.182	

15	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Strategis Pariwisata dipelihara/dikelola/dikembangkan	5 Jenis	505.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	**14%**	454.499.330	
16	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kawasan strategis pariwisata yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	2 Dokumen	52.015.000	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	50 Dokumen	75.749.690	
17	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan	1 Kawasan Strategis Pariwisata	575.700.000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 Laporan	328.249.830	
18	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**12%**	**13.614.355.600**	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	2 Unit Usaha	50.499.810	

19	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan destinasi pariwisata yang disusun	5 Dokumen	1.868.500.000	Program Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	**35%**	3.661.249.667	
20			Jumlah dokumen peraturan dan pengendalian pengembangan destinasi pariwisata yang disusun	1 Dokumen		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	**35%**	3.661.249.667	
21	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 Destinasi Pariwisata	8.579.505.600	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	883.749.897	
22			Jumlah destinasi pariwisata yang menyediakan layanan keamanan dan kesehatan dengan baik dan aktif	5 Destinasi Pariwisata		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	1.969.499.940	
23			Jumlah destinasi pariwisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu	5 Destinasi Pariwisata		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	151.499.970	

24			Jumlah destinasi pariwisata yang menyediakan atau memiliki petugas pemberi pelayanan informasi	5 Destinasi Pariwisata		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	100.999.980	
25	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang disediakan	5 Jenis	1.489.750.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5 Dokumen	555.499.880	
26			Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dipelihara	6 Jenis		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Pangandaran	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	**14%**	252.499.730	
27			Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang direhabilitasi	3 Jenis		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	**14%**	252.499.730	
28	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah destinasi pariwisata yang melibatkan parsitifasi masyarakat dalam pengelolaanya	2 Destinasi Pariwisata	404.000.000	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	201.999.880	

29			Jumlah destinasi pariwisata yang memberikan pembinaan kesadaran wisata kepada masyarakat sekitarnya	5 Destinasi Pariwisata		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.499.850	
30	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah indikator destinasi pariwisata berkelanjutan yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi	10 Indikator Berkelanjutan	1.272.600.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	**25%**	1.044.649.430	
31	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan**	**12%**	**454.500.000**	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Pangandaran	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	**25%**	908.299.650	
32	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani	100 Usaha Pariwisata	75.750.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	150 Orang	302.299.990	
33	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan	3 Usaha Pariwisata	328.250.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	75 Orang	151.499.890	

34			Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pengawasan	13 Usaha Pariwisata		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	150 Orang	302.999.920	
35			Jumlah peraturan dan panduan untuk industri dan usaha pariwisata yang disusun, diterapkan dan ditegakan	1 Dokumen		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	101.000.000	
36	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang distandarisasi	2 Usaha Pariwisata	50.500.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.499.850	
37	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan**	**30%**	**3.661.250.000**	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	**25%**	136.349.780	
38	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan**	**30%**	**3.661.250.000**	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	136.349.780	
39	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jenis media promosi yang dibuat	2 Jenis	883.750.000	Program Pengembangan Kebudayaan	Kab. Pangandaran	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	**16%**	1.736.850.000	

40	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	3 Kegiatan	1.969.500.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	**16%**	1.544.950.000	
41			Jumlah event promosi yang diikuti dan diselenggarakan	5 Event		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	1.544.950.000	
42	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jumlah database kepariwisataan yang akurat dan termutakhirkan yang disusun dan disebarkan	1 Dokumen	151.500.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	**16%**	191.900.000	
43	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	Jumlah kerjasama segmentasi pasar pariwisata yang dijalin	1 Kerjasama	101.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	191.900.000	
44			Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri pariwisata dalam hal promosi pariwisata yang dibuat	1 Kerjasama		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	**9%**	348.313.714	
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen strategi pemasaran dan pemilihan pasar sasaran dengan memperhatikan pola kunjungan, dampak kunjungan dan kebutuhan	1 Dokumen	555.500.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	**9%**	227.121.754	

			destinasi yang disusun								
46			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	95.854.261	
47			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang data pengeluaran pengunjung yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen		Penetapan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	131.267.493	
48			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang data tingkat hunian hotel yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase cagar budaya yang dikelola	**9%**	121.191.960	

49			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi laporan tentang lama tinggal wisatawan yang disusun secara periodik dan dipublikasikan	1 Dokumen		Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	121.191.960	
50	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi**	**12%**	**1.535.200.000**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	**90%**	11.177.372.703	
51	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase parasana kreatif yang dibangun**	**12%**	**555.500.000**		Kab. Pangandaran	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	**90%**		
52	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah prasarana zona kreatif yang dibangun	1 Zona Kreatif	555.500.000		Kab. Pangandaran	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	**90%**		
53			Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	3 Jenis			Kab. Pangandaran	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	**90%**		
54	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**12%**	**979.700.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	**90%**	121.199.840	
55	Pengembangan Riset	Kab. Pangandaran	Jumlah riset ekonomi kreatif yang disusun	1 Dokumen	101.000.000		Kab. Pangandaran	Persentase dokumen penganggaran	**90%**		

								kinerja yang disusun tepat waktu			
56	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	2 Subsektor	202.000.000		Kab. Pangandaran	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	**90%**		
57	Penyediaan Infrastruktur	Kab. Pangandaran	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang disediakan	2 Jenis	202.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	70.699.840	
58	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Pangandaran	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan untuk mengakses pasar global	2 Subsektor	373.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.525.000	
59			Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan	5 Produk		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.525.000	
60	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kab. Pangandaran	Jumlah produk ekonomi kreatif yang terregistrasi HKI	2 Produk	50.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.525.000	
61	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	1 Dokumen	50.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	2.525.000	

								SKPD			
62	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing**	**20%**	**1.146.350.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	35.350.000	
63	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar**	**20%**	**909.000.000**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.050.000	
64	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Pangandaran	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar	100 Orang	303.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	**90%**	6.382.323.737	
65			Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dasar	100 Orang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6.286.428.457	

66	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah masyarakat yang ikut berperan serta dalam peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata	100 Orang	151.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30.254.320	
67	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia (masyarakat) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang	303.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	30.291.400	
68			Jumlah sumber daya manusia (guru) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.299.700	
69			Jumlah sumber daya manusia (pelajar) yang mengikuti pelatihan dasar kepariwistaan	100 Orang		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.049.860	
70	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kab. Pangandaran	Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang disertifikasi	20 Orang	101.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	70.665.490	

71	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun dan dipublikasikan	1 Dokumen	50.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.049.900	
72	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**20%**	**237.350.000**	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.049.950	
73	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah pelaku ekonomi kraetif yang mendapatkan pelatihan	25 Orang	136.350.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.299.760	
74			Jumlah pelaku ekonomi keratif yang mendapatkan bimbingan teknis yang relevan	25 Orang		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.265.880	
75			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pendampingan	25 Orang		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	**20%**	60.599.140	
76	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang distandarisasi	5 Usaha	101.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	30.299.500	

77			Jumlah profesi di bidang ekonomi kreatif yang disertifikasi	5 Profesi		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.299.640	
78	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan**	**14%**	**2.434.100.000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	**90%**	440.450.666	
79	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola**	**14%**	**1.737.200.000**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	45.449.880	
80	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terregistrasi HKI	1 Objek Pemajuan Kebudayaan	1.590.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	25.244.636	
81			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	54.311.950	
82			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	2 Objek Pemajuan Kebudayaan		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	27.594.400	
83			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	2 Objek Pemajuan Kebudayaan		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.049.800	
84			Jumlah dokumen database kebudayaan yang termutakhirkan dan dipublikasikan	1 dokumen		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	90.900.000	

85	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dibina	25 Orang	146.450.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	90.900.000	
86			Jumlah Lembaga Kebudayaan yang dibina	2 Lembaga		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	101.000.000	
87			Jumlah Pranata Kebudayaan yang dibina	2 Pranata		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	**90%**	1.159.325.959	
88	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan**	**14%**	**242.400.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.965.486	
89	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang mempertahankan pakem dan dilindungi	1 Objek Pemajuan Tradisi Budaya	191.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	438.630.803	
90			Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dikembangkan	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.238.314	
91			Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dimanfaatkan	2 Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.858.000	

92	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Pangandaran	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi kepada pemajuan kebudayaan	2 Pihak	50.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	252.735.870	
93	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase lembaga adat yang dibina**	**14%**	**454.500.000**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	32.111.880	
94	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Pangandaran	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dilindungi	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat	252.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.049.606	
95			Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dikembangkan	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	75.750.000	
96			Jumlah objek pemajuan kebudayaan lembaga adat yang dimanfaatkan	1 Objek Pemajuan Lembaga Adat		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	302.986.000	
97	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia adat daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	202.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	**90%**	1.582.776.358	
98			Jumlah lembaga adat daerah yang mendapatkan pembinaan	2 Lembaga		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	541.480.000	

99			Jumlah pranata adat daerah yang mendapatkan pembinaan	1 Pranata		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	618.750.000	
100	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**	**14%**	**252.500.000**	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.776.000	
101	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan**	**14%**	**252.500.000**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan	10 Unit	121.199.800	
102	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang dididik	25 Orang	101.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.570.558	
103			Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pelatihan	25 Orang	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	**90%**	779.295.500	
104	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang distandarisasi	5 Orang	101.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	37.364.400	
105			Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang disertifikasi	5 Orang	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	327.100.000	

106	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia pada lembaga kesenian yang mengikuti peningkatan tata kelola lembaga kesenian tradisional	25 Orang	50.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	414.831.100	
107	**Program Pembinaan Sejarah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan**	**14%**	**101.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	**90%**	580.736.013	
108	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan**	**14%**	**101.000.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	252.492.802	
109	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah sumber daya manusia yang ikut serta dalam pemberdayaan sejarah lokal	25 Orang	101.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	100.993.411	
110			Jumlah lembaga sejarah yang ikut serta dalam pemberdayaan sejarah lokal	3 Lembaga		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.250.000	
111	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**7%**	**348.450.000**	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201.999.800	

112	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**7%**	**227.250.000**						
113	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen database objek diduga cagar budaya yang termutakhirkan dan dipublikasikan	1 Dokumen	95.950.000						
114			Jumlah objek diduga cagar budaya yang teregistrasi	10 Cagar Budaya							
115	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	5 Cagar Budaya	131.300.000						
116			Jumlah dokumen peraturan tentang penetapan cagar budaya yang disusun	1 Dokumen							
117	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**7%**	**121.200.000**						
118	Pelindungan Cagar Budaya	Kab. Pangandaran	Jumlah cagar budaya yang terpelihara dari kerusakan atau kehilangan	1 Cagar Budaya	121.200.000						
119	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**90%**	**12.294.977.305**						

120			**Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik**	**90%**							
121			**Persentase peningkatan kompetensi aparatur**	**90%**							
122			**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**90%**							
123	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**90%**	**121.200.000**						
124			**Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu**	**90%**							
125			**Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**90%**							
126	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	70.700.000						
127	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.525.000						

128	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.525.000						
129	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.525.000						
130	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Dokumen	2.525.000						
131	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 Kegiatan dan 16 Dokumen	35.350.000						
132	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	3 Laporan	5.050.000						
133	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**90%**	**6.392.983.457**						
134	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	42 Orang	6.286.428.457						
135	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	2 Dokumen	2.525.000						

136	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30.300.000						
137	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi SKPD yang dilaksanakan	2 Kegiatan dan 2 Laporan	30.300.000						
138	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	30.300.000						
139	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	5.050.000						
140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Laporan	5.050.000						
141	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	Jumlah laporan dan analaisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	3.030.000						
142	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	**85.850.000**						
143	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.050.000						

144	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	1 Jenis dan 1 Unit/Buah	5.050.000						
145	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	5.050.000						
146	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	5.050.000						
147	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	12 Laporan	30.300.000						
148	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	35 Jenis dan 1200 Unit/Buah	30.300.000						
149	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang digunakan	2 Jenis dan 9 Unit/Buah	5.050.000						
150	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**15%**	**106.050.000**						
151	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	1 Dokumen	15.150.000						

152	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah kebijakan yang dianalisa, dikembangkan dan disusun	1 Kebijakan	15.150.000						
153	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah penyuluhan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	15.150.000						
154	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah data retribusi daerah yang dikelola	2 Data	30.300.000						
155	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan	1 Laporan	30.300.000						
156	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**90%**	**440.865.000**						
157	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	1 Jenis dan 1 Unit/Buah	45.450.000						
158	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	42 Set	25.250.000						
159	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	1 Dokumen	54.540.000						
160	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Kegiatan dan 1 Laporan	27.775.000						

161	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan dan 1 Laporan	5.050.000						
162	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	42 Orang	90.900.000						
163	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	90.900.000						
164	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	3 Kegiatan dan 3 Laporan	101.000.000						
165	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**90%**	**999.958.848**						
166	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis dan 20 Unit/Buah	15.150.000						
167	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	60 Jenis dan 4000 Unit/Buah	438.651.348						

168	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Jenis dan3 Unit/Buah	25.250.000						
169	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Jenis dan 10 Unit/Buah	11.867.500						
170	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis dan 30 Unit/Buah	25.250.000						
171	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis dan 17 Eksemplar	40.400.000						
172	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	2 Jenis dan 6 Unit/Buah	5.050.000						
173	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah kunjungan tamu	3000 Orang	75.750.000						
174	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2 Kegiatan dan 150 Laporan	303.000.000						
175	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	2 Dokumen	5.050.000						
176	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	2 Sistem	54.540.000						

177	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**90%**	**2.737.100.000**						
178	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit	585.800.000						
179	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	3 Unit	666.600.000						
180	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis dan 3 Unit/Buah	101.000.000						
181	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 Jenis dan 6 Unit/Buah	121.200.000						
182	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Jenis dan 2 Unit/Buah	252.500.000						
183	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	1 Jenis dan 2 Unit/Buah	101.000.000						
184	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit dan 200 M2	707.000.000						

185	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	5 Jenis dan 15 Unit/Buah atau 50 M2	202.000.000						
186	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**90%**	**810.020.000**						
187	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1000 Buah	37.370.000						
188	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Rekening dan 12 Bulan	327.240.000						
189	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan dan 1 Orang atau 10 Unit	30.300.000						
190	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan dan13 Orang atau 4 Layanan	415.110.000						
191	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**90%**	**600.950.000**						

192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	11 Unit	252.500.000						
193	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	101.000.000						
194	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	15 Unit	25.250.000						
195	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola	3 Unit	5.050.000						
196	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	1 Jenis atau 1 Unit atau 1 Buah	15.150.000						
197	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit dan 80 M2	202.000.000						

Selain itu pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang lain. Adapun detail data dapat dilihat pada tablet-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Alasan Ajuan	Pagu Ajuan	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	desa babakan dan kalipucang, Kab. Pangandaran	tidak adanya gapura nuansa wisata	75.000.000,00	BELUM DITETAPKAN MENJADI DESA WISATA
2	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Sukaresik, Kab. Pangandaran	Penataan Kawasan Wisata Karangtirta	20.000.000.000,00	
3	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Cibodas, Kab. Pangandaran	Penataan Kawasan Wisata	1.000.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
4	PP Pengembangan Desa Wisata - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DESA BATUKARAS, Kab. Pangandaran	PEMBANGUNAN SAUNG BUDAYA LEGOK PARI DI DESA BATUKARAS RT 07/RW 04 DENGAN PANJANG 20 M X 21 M	50.000.000,00	

5	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA BATUKARAS, Kab. Pangandaran	PENATAAN SEMBAH AGUNG DI DUSUN PASUKETAN RT 28/W 13 DESA BATUKARAS	50.000.000,00	UNTUK PEMELIHARAAN DAYA TARIK WISATA RELIGI SEMBAH AGUNG
6	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA BOJONGSARI KECAMATAN PADAHERANG, Kab. Pangandaran	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WISATA DESA BOJONGSARI KECAMATAN PADAHERANG	300.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
7	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DI DESA PALEDAH YAKNI SYEKH MUCHTAR DESA PALEDAH KECAMATAN PADAHERANG;, Kab. Pangandaran	PERLU DIPERHATIKANNYA MENGENAI WISATA RELIGI YANG ADA DI DESA PALEDAH YAKNI SYEKH MUCHTAR DESA PALEDAH KECAMATAN PADAHERANG;	200.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
8	PP Pengembangan Desa Wisata - Pembangunan Jalan	DESA CIPARAKAN, Kab. Pangandaran	UCI SANUSI, TOKOH MASYARAKAT MENGAPRESIASI DAN MERASA SENANG DENGAN AKAN DIBANGUNYA JALAN HINGGA KE CICURUG KARENA DENGAN DIBANGUNNYA JALAN TERSEBUT AKAN MUNCUL POTENSI-POTENSI DI DESA SUKAHURIP TERUTAMA POTENSI WISATA, SALAH SATUNYA	100.000.000,00	DIALIHKAN KE DINAS PUPR

			AIR HANGAT YANG BERADA DI MUARATIGA. MEMOHON JUGA JALAN DARI MUARATIGA KE DESA CIPARAKAN SEPANJANG 600 METER KARENA DI JALAN TERSEBUT TERDAPAT SARANA PENDIDIKAN.		
9	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Campaka, Kab. Pangandaran	Penataan Kawasan Desa Wisata	300.000.000,00	BELUM DITETAPKAN MENJADI DESA WISATA
10	PP Pembangunan Pusat Budaya dan Desa Budaya Cikalong - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Lebakpari - Bangunjaya, Kab. Pangandaran	Pembangunan Pagar Kawasan Kampung Domba Permakultur Lebakpari	12.000.000,00	KE DINAS PETERNAKAN
11	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA BOJONGSARI KECAMATAN PADAHERANG., Kab. Pangandaran	PENGEMBANGAN WISATA DESA BOJONGSARI KECAMATAN PADAHERANG.	300.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
12	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DUSUN BABAKANSARI RT01 RW 03 DESA CIGANJENG KECAMATAN PADAHERANG;, Kab.	PENGEMBANGAN WISATA DI JOGJOGAN CIGANJENG DUSUN BABAKANSARI RT01 RW 03 DESA CIGANJENG KECAMATAN PADAHERANG;	300.000.000,00	BELUM DITETAPKAN MENJADI DESA WISATA, USULAN TIDAK SPESIFIK

		Pangandaran			
13	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DUSUN BOJONG DESA PUTRAPINGGAN , Kab. Pangandaran	PENINGKATAN SARANA PRASARANA OBJEK WISATA CURUG PURINGIS DUSUN BOJONG DESA PUTRAPINGGAN	150.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAHANAN WISATA AIR DAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
14	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran	PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA LEGALITAS LOKASI WISATA CURUG PURINGIS	150.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
15	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kecamatan cimerak, Kab. Pangandaran	pengembangan sarpas wisata	100.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
16	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kecamatan cimerak, Kab. Pangandaran	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
17	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA BANGUNJAYA, Kab. Pangandaran	PEMBANGUNAN WAHANA WISATA AIR DESA BANGUNJAYA;	300.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAHANAN WISATA AIR DAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
18	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA KERTAYASA, Kab. Pangandaran	PENGEMBANGAN PARIWISATA GREEN CANYON DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG;	500.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAHANAN WISATA AIR DAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
19	PP Pembangunan Pusat	DESA	BANTUAN ALAT		

	Budaya dan Desa Budaya Cikalong - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	KERTAYASA, Kab. Pangandaran	KESENIAN DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG	100.000.000,00	
20	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DESA CIJULANG, Kab. Pangandaran	PENGEMBANGAN PARIWISATA MANGROVE NUSAGEDE DI DUSUN NUSAGEDE DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG;	200.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAHANAN WISATA AIR DAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
21	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	harumandala, Kab. Pangandaran	4.Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.	200.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WAHANAN WISATA AIR DAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
22	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pagadungan, Kab. Pangandaran	Pengembangan desa wisata arung jeram poros dusun pagadungan desa pagerbumi	100.000.000,00	BELUM DITETAPKAN MENJADI DESA WISATA
23	PP Pengembangan Desa Wisata - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kertajaya, Kab. Pangandaran	Pembangunan Bumi Perkemahan Gunung Calung Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.	100.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
24	PP Pengembangan Desa Wisata - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	DESA BOJONGSARI, Kab. Pangandaran	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WISATA DESA BOJONGSARI KECAMATAN PADAHERANG	300.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK

	Kabupaten/Kota				
25	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Pangasinan Rt 20 Rw 06 Blok Paliken Desa Pasirgeulis, Kab. Pangandaran	Belum Tersedianya Sarana Prasarana untuk Menarik Pengunjung Wisatawan sehingga perlu - Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan kebutuhan volume 1 Paket	400.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK
26	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Cibeureum RT.04/RW.09 Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih, Kab. Pangandaran	Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Goa Parangpang yang masih belum terealisasi dengan volume 250 buah tenda camping, 100 buah hammock, 10 unit wc dan 50 unit gazebo	500.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
27	PP Pengembangan Desa Wisata - Rekonstruksi Jalan	Dusun Cimanggu RT03 RW09, Kab. Pangandaran	Belum tersedianya akses jalan Agro Wisata Manggis Juara Julangsari volume : 2.000x2,5x0,12 Meter	1.500.000.000,00	DINAS PUPR
28	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Bojongsari Kecamatan Padaherang, Kab. Pangandaran	Belum Optimalnya Sarana dan prasarana wisata Desa serta dibutuhkan untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan pengurus pokdarwis sehingga perlu - Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan	100.000.000,00	

			kebutuhan Volume 1 Paket		
29	PP Pembangunan Pusat Budaya dan Desa Budaya Cikalong - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dusun Paledah, Kab. Pangandaran	Menjaga kelestarian Budaya dan Perekonomian masyarakat sehingga dibutuhkan - Pembangunan/Rehabilitasi Cagar Budaya dengan kebutuhan Volume 3 Unit	1.300.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK ANTARA PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN
30	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Bagolokolot RT.13 RW.07 Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang, Kab. Pangandaran	Keterbatasan sarana dan prasarana/Penataan di Objek wisata Pantai Karapyak ini sangat dibutuhkan untuk menambah daya tarik para wisatawan, Volume 1 Paket termasuk kebutuhan PJU dengan Volume 100 unit	10.000.000.000,00	KE DISHUB
31	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Bojong RT 003 RW 006, Kab. Pangandaran	pembukaan wisata baru - pembangunan wisata curug cipuringis yang berlokasi di Dusun Bojong RT 003 RW 006, Volume 1 Paket	1.000.000.000,00	SUDAH DIAKOMODIR DI POKIR DPRD
32	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Karangpetir, Karangkamulyan, Cikubang, Kab. Pangandaran	Sarana dan Prasarana dilokasi Destinasi Wisata kurang memadai, 3 lokasi Destinasi Wisata	6.000.000.000,00	USULAN KURANG SPESIFIK
33	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan	Desa Pamotan, Kab.	Terdapat banyak potensi wisata terdapat di Desa	3.000.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN

	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pangandaran	Pamotan, seluruh SDM juga telah siap mengembangkannya menjadi Desa Wisata namun terhambat karena faktor anggaran yang sangat terbatas-Pengembangan Desa Wisata Pamotan, Volume 1 paket		
34	PP Pembangunan Pusat Budaya dan Desa Budaya Cikalong - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Desa Emplak, Kab. Pangandaran	Tidak ada sanggar seni budaya - Pembangunan Sanggar Seni Budaya Desa Emplak dengan volume 1 unit	300.000.000,00	
35	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Cigugur RT. 14 RW. 08, Kab. Pangandaran	Belum terkelolanya Wisata Religi Makam Sembah Ageung	-	TIDAK MENCANTUMKAN USULAN ANGGARAN
36	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Nusagede Ds/Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran	Sarana wisata rusak-Pembangunan Sarana Wisata Mangrove Dusun Nusagede Ds/Kec. Cijulang, Volume 1 Paket	1.000.000.000,00	MOHON AJUKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN CLEAN AND CLEAR STATUS LAHAN
37	PP Pengembangan Desa Wisata - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dusun Cikareo RT 014 RW 007 Desa Ciakar, Kab. Pangandaran	tidak maksimalnya destinasi wisata di leles-Pembukaa Pariwisata leles Ds.Ciakar Kec.Cijulang-1 Paket	200.000.000,00	USULAN TIDAK SPESIFIK

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2023; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018–2023 dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, yang digariskan dalam RIPPARNAS dan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Kemenparekraf/Baparekraf adalah bahwa pembangunan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, maka pembangunan dalam kedua bidang tersebut harus secara konkret memberikan kontribusi dalam program prioritas “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”. Selain itu, untuk mewujudkan kontribusi yang nyata maka diperlukan 5 pilar startegis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu :

1. Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif;

2. Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
5. Pilar kreatifitas.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 sesuai yang tertuang dalam dokumen RENSTRA KEMENDIKBUD Tahun 2020-2021 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Untuk mewujudkannya maka Kemendikbud mempunyai kegiatan-kegiatan prioritas dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu:

1. Registrasi nasional cagar budaya;
2. Pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda;
3. Revitalisasi dan pembangunan museum;
4. Revitalisasi cagar budaya;
5. Revitalisasi taman budaya;
6. Bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan;
7. *Europalia Arts Festival Indonesia*; serta
8. Pekan Budaya Indonesia.

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisisataan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat yaitu

1. mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya;mewujudkan potensi pariwisata Daerah Provinsi sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan;mewujudkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan aksesibilitas yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan internasional untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing global
2. mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatan dan industri kreatif khas Jawa Barat dalam membentuk identitas kepariwisataan Daerah Provinsi;mewujudkan industri pariwisata Daerah Provinsi yang berwawasan lingkungan dan budaya Jawa Barat
3. membangun pemasaran pariwisata yang terpadu antar daerah, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam membangun citra pariwisata di Daerah Provinsi berkelas dunia mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah, dan besar di Daerah Provinsi dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
4. optimalisasi peran Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan;mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2023 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan (Tahun 2023) dan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

MISI		RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN			
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023
Misi 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan	Peningkatan Akses dan Kualitas Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	6%
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,42 Hari
				Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	30%
				Persentase Budaya Lokal Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	20%
Misi 5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	69,25-72,00

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.33 terlampir :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (APBD Kabupaten)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
1	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**					**87.539.383.876**				**36.002.833.395**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KEBUDAYAAN**					**2.085.163.714**				**2.152.411.000**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**85.454.220.162**				**33.850.422.395**
4	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**69.318.448.632**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**17.112.238.706**
5	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase daya tarik wisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**2.065.847.000**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**2.086.614.550**

6	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pangandaran	5	Lokasi	2.005.315.460	APBD Kab. Pangandaran		5 Lokasi	2.025.408.550
7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	60.531.540	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	61.206.000
8	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**1.499.999.730**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**816.080.000**
9	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	3	Dokumen	1.499.999.730	APBD Kab. Pangandaran		3 Dokumen	816.080.000
8	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**65.298.102.572**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**13.750.499.156**
9	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	6	Dokumen	6.096.406.590	APBD Kab. Pangandaran		6 Dokumen	1.887.185.000
10	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pangandaran	5	Lokasi	7.781.751.590	APBD Kab. Pangandaran		5 Lokasi	8.665.300.656

11	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Pangandaran	10	Unit	50.797.872.260	APBD Kab. Pangandaran		10 Unit	1.504.647.500
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1	Laporan	400.399.950	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	408.040.000
13	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	3	Lokasi	221.672.182	APBD Kab. Pangandaran		3 Lokasi	1.285.326.000
14	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**454.499.330**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**459.045.000**
15	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	50	Dokumen	75.749.690	APBD Kab. Pangandaran		50 Dokumen	76.507.500
16	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Pangandaran	3	Laporan	328.249.830	APBD Kab. Pangandaran		3 Laporan	331.532.500
17	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Kab. Pangandaran	2	Unit Usaha	50.499.810	APBD Kab. Pangandaran		2 Unit Usaha	51.005.000
18	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan**	**Kab. Pangandaran**	**30**	**%**	**3.661.249.667**	**APBD Kab. Pangandaran**		**35%**	**3.697.862.500**

19	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan**	**Kab. Pangandaran**	**30**	**%**	**3.661.249.667**	**APBD Kab. Pangandaran**		**35%**	**3.697.862.500**
20	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	2	Dokumen	883.749.897	APBD Kab. Pangandaran		2 Dokumen	892.587.500
21	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	2	Laporan	1.969.499.940	APBD Kab. Pangandaran		2 Laporan	1.989.195.000
22	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	151.499.970	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	153.015.000
23	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pangandaran	2	Dokumen	100.999.980	APBD Kab. Pangandaran		2 Dokumen	102.010.000
24	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Pangandaran	5	Dokumen	555.499.880	APBD Kab. Pangandaran		5 Dokumen	561.055.000
25	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**252.499.730**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**255.025.000**
28	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**252.499.730**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**255.025.000**

29	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	1	Laporan	201.999.880	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	204.020.000
30	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	50.499.850	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	51.005.000
31	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing**	**Kab. Pangandaran**	**20**	**%**	**1.044.649.430**	**APBD Kab. Pangandaran**		**25%**	**1.055.803.500**
32	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar**	**Kab. Pangandaran**	**20**	**%**	**908.299.650**	**APBD Kab. Pangandaran**		**25%**	**918.090.000**
33	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Kab. Pangandaran	150	Orang	302.299.990	APBD Kab. Pangandaran		150 Orang	306.030.000
34	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pangandaran	75	Orang	151.499.890	APBD Kab. Pangandaran		75 Orang	153.015.000
35	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kab. Pangandaran	150	Orang	302.999.920	APBD Kab. Pangandaran		150 Orang	306.030.000

36	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Pangandaran	25	Orang	101.000.000	APBD Kab. Pangandaran		25 Orang	102.010.000
37	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	50.499.850	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	51.005.000
38	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**Kab. Pangandaran**	**20**	**%**	**136.349.780**	**APBD Kab. Pangandaran**		**25%**	**137.713.500**
39	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Pangandaran	60	Orang	136.349.780	APBD Kab. Pangandaran		60 Orang	137.713.500
40	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan**	**Kab. Pangandaran**	**14**	**%**	**1.736.850.000**	**APBD Kab. Pangandaran**		**16%**	**1.800.476.500**
41	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**14**	**%**	**1.544.950.000**	**APBD Kab. Pangandaran**		**16%**	**1.606.657.500**
42	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Pangandaran	2	Objek	1.544.950.000	APBD Kab. Pangandaran		2 Objek	1.606.657.500
43	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan**	**Kab. Pangandaran**	**14**	**%**	**191.900.000**	**APBD Kab. Pangandaran**		**16%**	**193.819.000**
44	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	Kab. Pangandaran	1	Objek	191.900.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Objek	193.819.000

		Pengembangan dan Pemanfaatan								
48	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**7**	**%**	**348.313.714**	**APBD Kab. Pangandaran**		**9%**	**351.934.500**
49	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase cagar budaya yang ditetapkan**	**Kab. Pangandaran**	**7**	**%**	**227.121.754**	**APBD Kab. Pangandaran**		**9%**	**229.522.500**
50	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Pangandaran	10	Objek	95.854.261	APBD Kab. Pangandaran		10 Objek	96.909.500
51	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Pangandaran	3	Objek	131.267.493	APBD Kab. Pangandaran		2 Objek	132.613.000
52	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase cagar budaya yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**7**	**%**	**121.191.960**	**APBD Kab. Pangandaran**		**9%**	**122.412.000**
53	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Pangandaran	3	Objek	121.191.960	APBD Kab. Pangandaran		3 Objek	122.412.000
54	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**11.177.372.703**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**11.729.492.689**
55		**Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**		**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	
56		**Persentase peningkatan kompetensi aparatur**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**		**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	
57		**Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**		**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	
58	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**121.199.840**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**122.412.000**
59		**Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**		**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	

60		**Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**		**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	
61	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	10	Dokumen	70.699.840	APBD Kab. Pangandaran		5 Dokumen	71.407.000
62	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	2.525.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	2.550.250
63	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	2.525.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	2.550.250
64	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	2.525.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	2.550.250
65	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	2.525.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	2.550.250
66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	16	Laporan	35.350.000	APBD Kab. Pangandaran		16 Laporan	35.703.500
67	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	3	Laporan	5.050.000	APBD Kab. Pangandaran		3 Laporan	5.100.500

68	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**6.382.323.737**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**7.011.980.803**
69	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	42	Orang/bulan	6.286.428.457	APBD Kab. Pangandaran		42 Orang/bulan	6.915.071.303
70	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	30.254.320	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	30.603.000
71	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pangandaran	2	Dokumen	30.291.400	APBD Kab. Pangandaran		2 Dokumen	30.603.000
72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	1	Laporan	30.299.700	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	30.603.000
73	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	1	Laporan	5.049.860	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	5.100.500
74	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik**	**Kab. Pangandaran**	**30 dan 900**	**Jenis dan Unit/Buah**	**70.665.490**	**APBD Kab. Pangandaran**		**30 Jenis dan 900 Unit/Buah**	**71.407.000**
75	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	5.049.900	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	5.100.500
76	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	5.049.950	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	5.100.500

77	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	12	Laporan	30.299.760	APBD Kab. Pangandaran		12 Laporan	30.603.000
78	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	1	Laporan	30.265.880	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	30.603.000
79	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah**	**Kab. Pangandaran**	**15**	**%**	**60.599.140**	**APBD Kab. Pangandaran**		**20%**	**61.206.000**
80	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	1	Laporan	30.299.500	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	30.603.000
81	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	30.299.640	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	30.603.000
82	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**440.450.666**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**445.273.650**
83	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pangandaran	5	Unit	45.449.880	APBD Kab. Pangandaran		5 Unit	45.904.500
84	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pangandaran	42	Paket	25.244.636	APBD Kab. Pangandaran		42 Paket	25.502.500
85	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	54.311.950	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	55.085.400
86	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	27.594.400	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	28.052.750

87	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	5.049.800	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	5.100.500
88	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	50	Orang	90.900.000	APBD Kab. Pangandaran		50 Orang	91.809.000
89	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	200	Orang	90.900.000	APBD Kab. Pangandaran		200 Orang	91.809.000
90	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	50	Orang	101.000.000	APBD Kab. Pangandaran		50 Orang	102.010.000
91	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**1.159.325.959**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**949.772.536**
92	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1	Paket	14.965.486	APBD Kab. Pangandaran		1 Paket	15.301.500
93	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	2	Paket	438.630.803	APBD Kab. Pangandaran		2 Paket	443.037.861
94	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1	Paket	25.238.314	APBD Kab. Pangandaran		1 Paket	25.502.500
95	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	1	Paket	11.858.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Paket	11.986.175

96	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	2	Paket	252.735.870	APBD Kab. Pangandaran		2 Paket	25.502.500
97	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3	Dokumen	32.111.880	APBD Kab. Pangandaran		3 Dokumen	40.804.000
98	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pangandaran	2	Paket	5.049.606	APBD Kab. Pangandaran		2 Paket	5.100.500
99	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	25	Laporan	75.750.000	APBD Kab. Pangandaran		25 Laporan	76.507.500
100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	150	Laporan	302.986.000	APBD Kab. Pangandaran		150 Laporan	306.030.000
102	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**1.582.776.358**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**1.693.366.000**
103	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	5	Unit	541.480.000	APBD Kab. Pangandaran		5 Unit	591.658.000
104	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3	Unit	618.750.000	APBD Kab. Pangandaran		3 Unit	673.266.000
105	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3	Unit	100.776.000	APBD Kab. Pangandaran		3 Unit	102.010.000
106	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	10	Unit	121.199.800	APBD Kab. Pangandaran		10 Unit	122.412.000

110	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran	20	Unit	200.570.558	APBD Kab. Pangandaran		20 Unit	204.020.000
111	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**779.295.500**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**787.517.200**
112	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	2	Laporan	37.364.400	APBD Kab. Pangandaran		2 Laporan	37.743.700
113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran	3	Laporan	327.100.000	APBD Kab. Pangandaran		1 Laporan	330.512.400
115	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran	4	Laporan	414.831.100	APBD Kab. Pangandaran		5 Laporan	419.261.100
116	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**Kab. Pangandaran**	**90**	**%**	**580.736.013**	**APBD Kab. Pangandaran**		**90%**	**586.557.500**
117	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran	11	Unit	252.492.802	APBD Kab. Pangandaran		11 Unit	255.025.000
118	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran	4	Unit	100.993.411	APBD Kab. Pangandaran		4 Unit	102.010.000
119	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	15	Unit	25.250.000	APBD Kab. Pangandaran		15 Unit	25.502.500
122	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran	2	Unit	201.999.800	APBD Kab. Pangandaran		2 Unit	204.020.000

1	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**					**87.539.383.876**				**36.002.833.395**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KEBUDAYAAN**					**2.085.163.714**				**2.152.411.000**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**85.454.220.162**				**33.850.422.395**
4	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**69.318.448.632**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**17.112.238.706**
5	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase daya tarik wisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**2.065.847.000**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**2.086.614.550**
6	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Pangandaran	5	Lokasi	2.005.315.460	APBD Kab. Pangandaran		5 Lokasi	2.025.408.550
7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1	Dokumen	60.531.540	APBD Kab. Pangandaran		1 Dokumen	61.206.000
8	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**1.499.999.730**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**816.080.000**
9	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	3	Dokumen	1.499.999.730	APBD Kab. Pangandaran		3 Dokumen	816.080.000
8	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikelola**	**Kab. Pangandaran**	**12**	**%**	**65.298.102.572**	**APBD Kab. Pangandaran**		**14%**	**13.750.499.156**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum

perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Periode 2021-2026, dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimilki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran juga menentukan Keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pangandaran pada umumnya.